

Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan Energi Nuklir Amerika Serikat-India

Riza Ambardini

*Alumnus Program Studi S1 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRACT

This paper discusses the consideration of U.S government towards the Nuclear Agreement with India. Nuclear has been being tremendous factor of foreign policy since its significance influence on decision making of foreign policy. India as the rising economic power country has the capability to develop nuclear. India's nuclear test on 1974 and 1998 prove that the nuclear energy could be developed into explosive nuclear. Due to India's nuclear test and India is not a signatory of Non-Proliferation Treaty, the U.S has to obligate the Non-Proliferation Treaty and its national law that prohibit any nuclear material transfer to India. I argue that consideration of the U.S government towards the Nuclear Agreement with India because the U.S government assumed that it would bring multiple benefits to this state.

Keywords: *US, bilateral agreement, nuclear energy, India, consideration.*

Tulisan ini membahas mengenai pertimbangan pemerintah AS melakukan Perjanjian Nuklir dengan India. Nuklir menjadi faktor penting dalam kebijakan luar negeri sejak pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan kebijakan luar negeri sangatlah signifikan. India sebagai negara yang kekuatan ekonominya sedang tumbuh cepat, memiliki kapabilitas mengembangkan nuklir. Uji coba nuklir India pada 1974 dan 1998 membuktikan bahwa energi nuklir dapat dikembangkan menjadi hulu ledak nuklir. Karena uji coba nuklir tersebut, sementara India bukanlah negara penandatanganan Non-Proliferation Treaty (NPT), Amerika Serikat berdasarkan NPT dan hukum nasionalnya telah melarang segala bentuk transfer material nuklir ke India. Dalam tulisan ini, dipaparkan bahwa pertimbangan pemerintah AS melakukan Perjanjian Nuklir dengan India dilatarbelakangi anggapan pemerintah AS bahwa perjanjian tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi negara ini.

Kata-Kata Kunci: *AS, perjanjian bilateral, energi nuklir, India, pertimbangan.*

Perjalanan India dalam menapaki program nuklir dimulai di *Bhabha Atomic Research Center* di Trombay, pada pertengahan tahun 1950-an dengan konsep teknologi nuklir *Atom For Peace* program *Non-Proliferation*, yakni pengembangan nuklir untuk penggunaan perdamaian (*Federation of American Scientist* 2002). Berdasarkan pemantauan Joseph Cirincione dari *Carnegie Endowment for International Peace*, ternyata India memiliki ketertarikan terhadap persenjataan nuklir (Cirincione 2002). Hal ini ditandai dengan penggunaan Cirus 40 MWt *heavy water* dengan reaktor dari Kanada dan pembelian *heavy water* dari Amerika Serikat (AS) untuk pengoperasiannya. Kerjasama nuklir AS - India pada masa ini dapat dilihat dengan kerjasama pembangunan reaktor nuklir (Tarapur), penyediaan *heavy water* untuk reaktor Cirus, serta perijinan untuk ilmuwan India dalam mendalami kajian nuklir di laboratorium nuklir AS (Pan & Bajoria 2008).

Pada 1974, India melakukan proses pemisahan plutonium yang dihasilkan dari penelitian reaktor Cirus. Berbekal plutonium tersebut, pada 18 Mei 1974, India melakukan tes nuklir pertama kali dan dideskripsikan oleh pemerintah India sebagai *Peaceful Nuclear Explosion* (*Federation of American Scientist* 2002). Meskipun tes nuklir India pada 1974 ini sukses menunjukkan adanya transfer teknologi nuklir untuk tujuan perdamaian, namun tidak bisa dimungkiri tetap berpotensi memunculkan kecurigaan akan adanya produksi persenjataan nuklir (Squassoni 2005). Hal ini mendapat respon dari Kongres AS dengan mengeluarkan *Nuclear Non-Proliferation Act of 1978* (NNPA, P.L 95-242) yang menekankan persyaratan baru yang lebih ketat mengenai ekspor nuklir AS ke negara lain yang tidak memiliki senjata nuklir. Peraturan ini dilengkapi *safeguard* dan terminasi ekspor nuklir manakala sebuah negara mengaktifkan detonasi nuklir eksplosif atau berkaitan dengan aktifitas pengembangan senjata nuklir (Squassoni 2005). Bahkan secara internasional, AS membentuk *Nuclear Suppliers Group* (NSG) pada 1975 sebagai bentuk implementasi kontrol ekspor nuklir (Squassoni 2005). NSG lantas mengeluarkan garis pedoman pada 1978 yakni "to apply to nuclear transfers for peaceful purposes to help ensure that such transfers would not be diverted to unsafeguarded nuclear fuel cycle of nuclear explosive activities". Dapat disimpulkan bahwa pembentukan NSG merupakan salah satu bentuk respon AS terhadap tes nuklir India 1974 dalam rangka pengamanan ketat dan memastikan bahwa transfer nuklir tidak digunakan untuk aktifitas nuklir eksplosif.

Di sisi lainnya, muncul *Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang merupakan perjanjian multilateral mengenai upaya kontrol terhadap nuklir. Secara struktur, NPT mengindikasikan adanya dikotomi antara negara berkepemilikan nuklir dengan negara yang tidak memiliki nuklir, hal ini

mengantarkan pada adanya indikasi kewenangan kepemilikan nuklir yang dimonopoli oleh negara-negara tertentu. Dalam NPT, lima negara yang berkewenangan memiliki nuklir adalah negara yang telah melakukan tes nuklir sebelum 1 Januari 1967, yakni AS, Rusia, Inggris, Perancis dan China (Squassoni 2006). India sebagai negara nuklir yang tidak memiliki kewenangan kepemilikan nuklir sesuai NPT menolak untuk menandatangani NPT karena dianggap sebagai bentuk diskriminatif mengenai kepemilikan nuklir sebuah negara sehingga pada 1998 India kembali melakukan tes nuklir sebagai respon dari tes nuklir yang dilakukan Pakistan. Dampaknya pada 6 Juni 1998, PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1172 merujuk pada India dan Pakistan untuk menghentikan tes nuklir serta penghentian negara lain untuk mengeksport material atau teknologi yang dapat memfasilitasi negara lain untuk memproduksi persenjataan (*Council of Foreign Relations* 2009). Bahkan AS memberikan sanksi dan embargo ekonomi terhadap India, hingga kemudian dapat dicabut kembali berkat keberhasilan diplomasi pemerintah India.

Akhir September 2001, perubahan kebijakan luar negeri AS terkait nuklir India mengalami perubahan signifikan dengan dikeluarkannya kebijakan Presiden Bush mencabut sanksi yang dikenakan berdasarkan ketentuan *The 1994 Nuclear Proliferation Prevention Act* terkait tes nuklir India pada Mei 1998. Dialog mengenai non-proliferasi dimulai setelah uji coba nuklir 1998 tersebut menjembatani berbagai kesenjangan dan pemahaman antar negara (*The Acronym Institute* 2008). Kebijakan pemerintah AS memiliki momentum bersejarah pada 18 Juli 2005 ketika Presiden George W. Bush melakukan kesepakatan kerjasama nuklir bilateral dengan Perdana Menteri India, Dr. Manmohan Singh, *US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative* atau lebih dikenal *123 agreement* (Singh 2007). Traktat nuklir senilai 27 miliar USD ini berisikan bahwa AS akan membangun 18 sampai 20 reaktor nuklir di India hingga tahun 2020. Tim pengawas internasional berhak untuk memeriksa instalasi nuklir sipil India, sedangkan instalasi nuklir militer India tetap tertutup bagi tim pengawas internasional (indonesian.irib.ir 2007). Selain itu, India akan mendapatkan akses terhadap bahan bakar nuklir dari AS dan pemasok lainnya yakni dari *Nuclear Suppliers Group* (NSG) (Spector 2008). India kemudian dapat bertransaksi untuk pembelian *dual-use* teknologi nuklir dari AS, termasuk material dan peralatan yang digunakan untuk memperkaya uranium atau memproses plutonium dan berpotensi membentuk material bom nuklir selain dapat menambah pasokan gas untuk reaktor nuklirnya (Pan & Bajoria 2008).

Kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India oleh AS menuai berbagai pendapat baik yang pro maupun kontra. Kontradiksi dalam kesepakatan kerjasama nuklir AS-India ini merujuk pada standar

ganda (*double standards*) kebijakan luar negeri. Sejatinya, pencegahan proliferasi nuklir merupakan kepentingan nasional utama AS (Ferguson et al. 2007). Dalam undang-undang AS, terdapat *Atomic Energy Act* dan *Hyde Act* yang mengatur permasalahan berkaitan proliferasi nuklir. *Section 129 Atomic Energy Act* dan *Section 104 Hyde Act* menjelaskan bahwa apabila India melakukan uji coba nuklir, AS diharuskan menghentikan seluruh ekspor nuklirnya (*carnegieendowment* 2007). Mengacu pada tes nuklir India pada tahun 1974 dan 1998, seharusnya AS diharuskan untuk tidak melakukan ekspor nuklir. Kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India semakin diperjelas dengan diratifikasinya kesepakatan tersebut oleh Kongres AS pada 2008 (Departemen Luar Negeri Indonesia 2009). Kebijakan luar negeri AS ini tentunya memiliki pertimbangan pihak eksekutif dan legislatif AS sehingga serta merta melakukan sebuah kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir yang dinilai telah menyalahi aturan yang ada. Pemaparan mengenai fluktuasi hubungan AS-India di atas menunjukkan adanya kontradiksi. Di awal kemunculannya, AS menentang pengadaan nuklir India, namun, setelah melalui perjalanan waktu yang telah dipaparkan, AS justru melakukan kerjasama dengan India. Kontradiksi yang muncul tersebut yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Transformasi Hubungan Bilateral AS-India

Pada bulan Januari 2004, AS dan India meluncurkan *Next Steps in Strategic Partnership* (NSSP), yang merupakan tonggak dalam transformasi hubungan bilateral dan cetak biru untuk kemajuan yang lebih jauh (*The Acronym Institute* 2008; *U.S Department of State* 2007a; *Global Security* 2010). Kerjasama di dalam *Next Steps in Strategic Partnership* (NSSP) mencakup tiga area spesifik yakni aktifitas nuklir perdamaian, program angkasa perdamaian, dan perdagangan teknologi tinggi. Tonggak kerjasama NSSP berdampak signifikan bagi hubungan bilateral AS-India. Bush menekankan bahwa pertimbangan ekonomi, lingkungan, upaya pencapaian stabilitas Asia, kesamaan nilai-nilai dan kepentingan, pencapaian perdamaian dan kemakmuran global, mitra dalam *war on terrorism*, kontrol terhadap proliferasi senjata pemusnah masal menjadi konsiderasi pemerintah AS untuk mempererat hubungan bilateral dengan India. Tanggal 18 Juli 2005 merupakan momentum yang sangat berpengaruh bagi AS dan India, dikarenakan pada hari itu Perdana Menteri Manmohan Singh mengadakan kunjungan ke Washington DC dan kedua pemimpin ini mengumumkan keberhasilan NSSP serta perjanjian lain terkait peningkatan kerjasama dibidang nuklir perdamaian, dan perdagangan teknologi. Beberapa inisiatif kerjasama diumumkan pada pertemuan ini meliputi dialog ekonomi AS-India, melawan bahaya HIV/AIDS, penanggulangan

bencana, kerjasama teknologi, prakarsa demokrasi, prakarsa pengetahuan pertanian, forum kebijakan perdagangan, dialog energi dan forum CEO (*The Acronym Institute 2008; U.S Departement of State 2007b*).

Salah satu tonggak bersejarah dalam kebijakan luar negeri AS pada tanggal 18 Juli 2005 tersebut adalah munculnya *US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative* atau lebih dikenal dengan *123 Agreement*, yakni kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir antara AS dan India. Hal ini sangat berkebalikan dengan kebijakan nonproliferasi AS. Presiden Bush bahkan berjanji akan meyakinkan Kongres untuk melakukan amandemen terhadap peraturan sebelumnya untuk menerima kesepakatan kerjasama nuklir dengan India (Squassoni 2007; Kronstadt 2007). *Separation plan* terkait *123 Agreement* kembali ditegaskan oleh Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh pada kunjungan Bush ke India pada 2 Maret 2006 (Squassoni 2005; Kronstadt 2007). Kunjungan Presiden Bush mendapatkan sambutan besar di India, meskipun diwarnai puluhan ribu demonstran berjajar di beberapa kota di India untuk menentang kebijakan AS dan kemitraan New Delhi dan Washington. Presiden Bush dan Perdana Menteri Singh mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan kepuasan bersama dengan adanya kemajuan besar dalam memajukan hubungan kemitraan strategis AS-India (Kronstadt 2007).¹ Pada 16 Maret 2006, H.R. 4974 dan S. 2429, Presiden Bush meminta *House of Representative* dan Senat untuk mengesampingkan aplikasi persyaratan tertentu dalam UU Energi Atom 1954 (*Atomic Energy Act 1954*) sehubungan dengan India. Penundaan legislasi juga terkait H.Con Res. 318 yang menyatakan keprihatinan mengenai proliferasi nuklir terhadap usulan kerjasama nuklir perdamaian penuh dengan India (Kronstadt, 2007).

Undang-Undang AS *Atomic Energy Act* diubah menjadi *Henry J. Hyde Act (Hyde Act)* pada Desember 2006. Hal ini memungkinkan pemerintah AS untuk menyimpulkan *123 Agreement* dengan India untuk memulai perdagangan nuklir untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. *123 agreement* menyediakan basis operasional dan dasar hukum lainnya sehingga perusahaan-perusahaan AS dapat memulai

¹ *123 Agreement* merupakan gerbang kemitraan strategis antara AS dan India. *123 Agreement* dapat dioperasionalkan dikarenakan "123" mengacu pada Section 123 dari *1954 U.S Atomic Energi Act* yang mengatur segala bentuk kesepakatan kerjasama perdamaian AS (carnegieendowment 2007). Premis dari kebijakan *123 Agreement* membebaskan India dari sanksi yang dibebankan terkait tes nuklir pada 1974 dan 1998. Untuk menghadapi hal tersebut, Kongres merubah peraturan terhadap sanksi tersebut, yang kemudian disebut *Hyde Act* (carnegieendowment 2007).

perdagangan nuklir dengan India. *Hyde Act* memberikan jalan bagi India untuk dapat membeli reaktor dan bahan bakar nuklir untuk penggunaan perdamaian (Squassoni 2005). Pada bulan Juli 2007, AS dan India kembali mencapai tonggak bersejarah dalam kemitraan strategis dengan menyelesaikan negosiasi pada perjanjian bilateral *123 Agreement* (US Department of State 2008). Dewan Gubernur IAEA di Wina menyetujui *India Safeguard Agreement* pada tanggal 1 Agustus 2008. Kunci prasyarat lain untuk meudahkan *123 Agreement* juga berlangsung di Wina pada tanggal 6 September 2008 melalui keputusan konsensus dari negosiasi dengan NSG. Hal ini ditujukan untuk memberikan pengecualian terhadap persyaratan perlindungan untuk mengizinkan pasokan nuklir perdamaian ke India (US Department of State Bureau of South and Central Asian Affairs 2008). Perjanjian kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS - India ini kemudian ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice dan Menteri Luar Negeri India Mukherjee pada tanggal 10 Oktober 2008.

Komunitas Internasional telah mengalami perdebatan mengenai pro dan kontra terhadap kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India semenjak diumumkan pada Juli 2005 (Koizumi 2006). Beberapa yang mendukung hal ini sebagai alat strategis AS untuk memperkuat hubungan dengan India, yang merupakan *rising superpower* dan penekanan pada pendekatan realistis dalam pendekatan isu nuklir. Beberapa memberikan penolakan dengan mengacu pada ancaman terhadap rezim NPT (Koizumi 2006). Pada tanggal 10 September 2008, Presiden menyampaikan *123 Agreement* kepada Kongres AS untuk diperiksa dan disetujui. Jika kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India diterima dan disetujui oleh Kongres AS, kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir ini akan menjadi kerangka hukum bagi AS untuk terlibat dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan mitra strategis, dalam hal ini India. Presiden Bush telah membuat keputusan-keputusan yang diperlukan untuk kemajuan India pada sejumlah komitmen yang dicapai dalam *Joint Statement 2005* dengan sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan Undang-Undang AS, *Hyde Act* (The Times of India, 2008). Meskipun demikian, beberapa anggota Kongres AS menyatakan keprihatinan bahwa dengan adanya kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India akan memungkinkan negara itu untuk memajukan proyek-proyek militer nuklir dan dapat merusak upaya AS dalam pencapaian nonproliferasi nuklir. Sebelumnya pemerintahan Bush telah menegaskan bahwa kerjasama tersebut akan berlangsung hanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh rezim nonproliferasi multilateral. Pemerintah kemudian secara aktif mencari penyesuaian terhadap Undang-Undang AS dan

melakukan pendekatan dengan NSG dalam upaya penyesuaian pedoman yang telah ditetapkan (Kronstadt 2007, 15).

Pada 27 September 2008, setelah melalui perdebatan yang panjang dan frekuensi ketegangan tinggi terkait penangguhan peraturan normal prosedur untuk penerimaan resolusi kesepakatan kerjasama nuklir yang penuh dilema, *House of Representatives* AS mengeluarkan hasil voting terhadap kesepakatan kerjasama nuklir tersebut yang menghasilkan sebanyak 298 suara setuju menerima kesepakatan kerjasama nuklir dengan India dan 117 suara menolak (US Department of State 2008). Beberapa senator menggunakan peraturan parlemen untuk menggagalkan putusan dan memblokir undang-undang yang disetujui komite agar tidak terpilih oleh Senat penuh, namun dapat diredakan dengan pengadaaan voting Senat pada akhir bulan (The Acronym Institute 2008). Kurang lebih setahun setelah itu, Senat terlibat debat terkait resolusi dan amandemen oleh Senator Byron Dorgan (Demokrat dari North Dakota) dan Jeff Bingaman (Demokrat dari New Mexico) yang mengupayakan pengklarifikasian kebijakan AS untuk meniadakan perdagangan nuklir dengan India jika negara tersebut melakukan lanjutan tes nuklir. Mengutip laporan berbagai administrasi Bush respon argumen anggota Senat pendukung kesepakatan kerjasama nuklir bahwa amendemen tersebut tidak diperlukan. Senator Richard Lugar (Republik dari Indiana) mengatakan: "*if India resumes testing, the 123 agreement is over.*" Lebih lanjut, amendemen dapat dikalahkan voting Senat AS yang menghasilkan penerimaan kesepakatan kerjasama nuklir dengan India dengan 86 suara setuju dan 13 suara menolak (BBC News, 2008.; US Department of State 2008; The Acronym Institute 2008). Dengan demikian Kongres sebagai pihak legislatif AS menerima kebijakan luar negeri Presiden Bush dalam kesepakatan kerjasama nuklir dengan India. Selanjutnya pada 8 Oktober 2008 Presiden Bush menandatangani *United States-India Nuclear Cooperation Approval and Nonproliferation Enhancement Act*, sebagai bentuk penerimaan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India (*123 Agreement*). Hal ini dilanjutkan dengan kebijakan HR 7081 dan menjadi hukum publik.

Keuntungan AS menurut Pihak Eksekutif

Sebagaimana telah dijabarkan dalam berbagai pernyataan Presiden Bush dan pihak eksekutif lainnya mengenai konsederasi logis dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India dengan berbagai keuntungan yang akan diperoleh AS beserta analisis adalah sebagai berikut.

Peningkatkan Pencapaian Non-Proliferasi Nuklir Global

Kontradiksi antara kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India dengan pencapaian nonproliferasi AS menjadi tantangan tersendiri. Korelasi ini ternyata membuahkan keuntungan bagi AS untuk dapat merangkul India untuk masuk kedalam rezim nonproliferasi nuklir. James Steinberg, *Deputy Secretary of State* mengungkapkan pada diskusi panel bertajuk “The U.S.-India Nuclear Agreement: Expectations and Consequences” di *The Brooking Institution*, Washington D.C tanggal 23 Maret 2009: “The agreement not only provides a concrete platform for economic and technological cooperation between our two countries, but also offers a basis for moving beyond one of our most serious barriers to political cooperation, the status of India’s nuclear program”. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa selain ekonomi dan teknologi, kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India bertujuan untuk menggiring India masuk dalam rezim non-proliferasi.

Under Secretary of State for Political Affairs Nichols Burns menekankan bahwa India memiliki catatan pengecualian terhadap non-proliferasi, hal ini merujuk pada sejarah kontrol ekspor nuklir India (Burns pada *briefing* 19 Juli 2005 dalam Squassoni 2005). Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan transfer material sensitif nuklir oleh India kepada negara yang tidak memiliki senjata nuklir (Squassoni 2005). Burns optimistis terhadap kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India dengan mengatakan “this agreement can be verified and will be verified.” Dengan adanya kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India, India diharuskan memperketat kontrol terhadap perturan ekspor nuklirnya (Squassoni 2005). Keuntungan ini menjelaskan adanya pemenuhan keuntungan dengan pencapaian kepentingan nasional AS pada elemen *power*, yakni kekuatan untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku negara India untuk melakukan hal yang diinginkan AS. Dengan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India, AS dapat merangkul India masuk kedalam rezim non-proliferasi sesuai keinginan AS. Sejatinnya proliferasi bagi AS memiliki makna berbeda yang harus sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Perlindungan terhadap Lingkungan

AS dan India memiliki kerangka penting untuk melakukan perlindungan terhadap lingkungan. James Steinberg (2009) menjelaskan bahwa AS memiliki *mandatory plan* untuk pengurangan emisi, namun juga harus dipastikan bahwa India turut andil dalam solusi efektif perubahan iklim. Kerjasama dengan India ditujukan untuk pembentukan teknologi baru, sumber daya yang lebih aman bagi konservasi lingkungan. Perlindungan

terhadap lingkungan merupakan bentuk pencapaian nilai yang diinginkan AS dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India. Hal ini memberikan pemenuhan terhadap kepentingan nasional AS terkait elemen *power* untuk memengaruhi India melakukan nilai yang diinginkan AS.

Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Presiden *US-India Business Council* Ron Somers melakukan kalkulasi yang sederhana dengan mengatakan “The U.S.-India nuclear deal will present a major opportunity for U.S. and Indian companies.” Somers menambahkan bahwa kerjasama tersebut akan menciptakan sekitar 27.000 pekerjaan kualitas tinggi setiap tahun pada dekade kedepan untuk industri nuklir AS (Raman 2009). *U.S Chamber of Commerce* yang bekerjasama dengan *US-India Business Council*, melobi penuh dukungan terhadap inisiatif Presiden Bush, dengan spekulasi bahwa kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India bisa menghasilkan kontrak untuk bisnis AS senilai hingga USD 100 miliar (Krishnaswarni 2006). Kesepakatan kerjasama nuklir sipil AS-India akan menguntungkan pebisnis dan pengusaha dari AS karena meningkatkan kesempatan komersial dan keuntungan yang signifikan. Oleh karena itu, mereka memiliki satu suara untuk mendukung kebijakan AS tersebut. Kebutuhan energi India hingga tahun 2012 memerlukan investasi lebih dari USD 170 miliar. Perusahaan-perusahaan AS mendapat peluang dan kesempatan untuk menyediakan peralatan, layanan dan teknologi untuk membantu India dalam memenuhi kebutuhan keamanan energi mereka (Krishnaswarni 2006).

Perhitungan keuntungan ini berbasis ekonomi dengan acuan jumlah nominal yang akan diperoleh AS dari India dengan penggambaran kalkulasi ekonomi. Jika India membangun sepuluh pembangkit tenaga nuklir ukuran besar dalam 15 tahun mendatang, maka India akan mengimpor teknologi dan perangkat keras dari AS setidaknya setengah dari proyek-proyek (sisanya datang dari tempat lain) (Sud 2006). Masing-masing pembangkit akan menelan biaya sekitar USD 4 miliar. Singkatnya, proyek sebesar USD 15-20 miliar akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan AS di 6-8 tahun kedepan. Sisa pesanan ke Perancis, Jerman, Kanada dan Inggris. Dana untuk instalasi ini akan datang ke India baik dalam bentuk FDI atau pinjaman lunak dan komersial. Sebagai imbalannya India akan membayar kembali dengan ekspor barang dan jasa (Sud 2006). Penciptaan lapangan pekerjaan bagi AS berkorelasi dengan keuntungan secara ekonomi yang akan didapat. Penghasilan negara akan bertambah dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih komprehensif. Keuntungan ini merupakan pemenuhan kepentingan nasional AS terkait elemen *prosperity* yang

merupakan bentuk kemakmuran bagi AS dengan basis ekonomi yang menguntungkan.

Membantu India Menghadapi Pertumbuhan Energi

James Steinberg (2009) mengemukakan bahwa energi merupakan salah satu keuntungan dari kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India. Populasi tinggi menyebabkan India membutuhkan akses listrik yang lebih besar sehingga kolaborasi infrastruktur energi dapat diimplementasikan melalui kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India. Membantu India untuk menghadapi pertumbuhan energi, AS menginginkan keamanan energi dan kebijakan energi yang bertanggung jawab. Hal ini merupakan kepentingan nasional terkait elemen *peace* yang menitikberatkan perdamaian sesuai nilai yang dianut AS dan telah disampaikan Presiden Bush pada perumusan NSSP 2004.

Selain keuntungan diatas, kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India dilakukan oleh Presiden Bush dikarenakan adanya kesamaan nilai-nilai, ideologi demokrasi, dan kepentingan yang sinergis didalamnya seperti yang telah disampaikan Presiden Bush dalam pidatonya setelah perumusan NSSP 2004 dan *Joint Statement 123 Agreement* pada 2005 dengan India. Penjabaran keuntungan yang diatas menunjukkan konsiderasi pihak eksekutif pemerintah AS dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India yang memenuhi *framework* kepentingan nasional AS sebagaimana pemikiran Ikenberry yakni *power, prosperity, peace* dan *principles* (4P). Selain itu, hal ini menunjukkan adanya pendekatan realisme dalam kebijakan luar negeri AS terkait kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India dengan acuan kepentingan nasional yang ingin dicapai.

Konsiderasi Kongres Amerika Serikat

Senate Report 109-288 - S.3709 (2006) merupakan bentuk respon Kongres yang membahas persyaratan dalam *Atomic Energy Act 1954* dalam hal ekspor material nuklir, peralatan dan teknologi ke India dan implementasi tambahan protokol didalam peraturan AS. Di dalam Bill S.3709 yang disponsori Senator Richard Lugar disebutkan konsiderasi Kongres dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India adalah pertama, penguatan hubungan bilateral dengan India termasuk dalam kepentingan nasional AS. Kedua, AS dan India memiliki kesamaan nilai-nilai demokratik dan memiliki potensi untuk peningkatan kerjasama ekonomi. Ketiga, perdagangan dalam energi nuklir perdamaian dengan India oleh AS dan negara lain akan berpotensi menguntungkan untuk seluruh warga negara di dunia. Keempat, menyediakan perubahan signifikan dalam kebijakan AS

terkait perdagangan dengan negara lain yang bukan termasuk dalam dalam *Nuclear Non-Proliferation Treaty* yang menekankan pada pondasi rezim non-proliferasi internasional. Kelima, perdagangan energi nuklir perdamaian dengan India oleh AS dan negara lain harus sesuai dengan aturan meminimalisir resiko penyebaran nuklir atau perlombaan senjata regional dan memaksimalkan ketaatan India terhadap rezim non-proliferasi internasional termasuk secara khusus aturan dalam Nuclear Suppliers Group (NSG) dan terakhir, tidak diperkenankan memfasilitasi atau mendukung keberlanjutan ekspor nuklir India oleh pihak lain jika ekspor nuklir tersebut dihentikan oleh AS.

Sesuai dengan Senate Report 109-288 (2006), keuntungan yang didapatkan AS dari kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India adalah untuk memperdalam kerjasama *strategic partnership*, meningkatkan keamanan di bidang energi (*energy security*), menguntungkan lingkungan, menciptakan peluang bagi pengusaha AS, meningkatkan rezim internasional dalam bidang non-proliferasi nuklir. Memperdalam kerjasama *strategic partnership* merupakan bentuk pemenuhan kepentingan nasional AS pada elemen *power*, *prosperity* dan *principles*. Dengan penguatan kemitraan strategis dengan India dapat memberikan keuntungan bagi AS dalam hal *power*, yakni penambahan kekuatan sekutu dan kapabilitas untuk memengaruhi India dalam pemenuhan kepentingan nasional yang lain. *Prosperity* dapat dicapai dengan penguatan kemitraan strategis dengan berbagai kerjasama yang berbasis keuntungan ekonomi akan menciptakan kemakmuran bagi warga AS. *Principles* dalam kemitraan strategis dapat dicapai dengan persamaan nilai-nilai, ideologi demokrasi dan kepentingan.

Peningkatan keamanan di bidang energi merupakan bentuk pemenuhan kepentingan nasional AS pada elemen *peace*, dengan adanya kebijakan keamanan dibidang energi dan kebijakan yang bertanggung jawab akan mencapai perdamaian yang diinginkan oleh AS. Menguntungkan lingkungan merupakan bentuk pencapaian kepentingan nasional AS pada elemen *principles* dan *power* karena dapat memengaruhi India untuk mengikuti nilai-nilai perlindungan lingkungan sebagaimana nilai yang dianut AS. Peluang bagi pengusaha AS merupakan bentuk pencapaian kepentingan nasional AS pada elemen *prosperity*, dengan keuntungan ekonomi yang didapatkan. Sedangkan, peningkatan rezim internasional dalam nonproliferasi nuklir merupakan bentuk pencapaian kepentingan nasional AS pada elemen *principles* dan *power* karena AS akan lebih mudah mengarahkan India untuk masuk dalam rezim nonproliferasi yang dianut AS.

Keuntungan yang didapatkan AS menurut pihak legislatif ini menunjukkan adanya upaya pemenuhan kepentingan nasional AS sebagaimana pemikiran Ikenberry (2007) yakni *power, prosperity, peace* dan *principles* (4P). Selain itu, hal ini menunjukkan adanya pendekatan realisme dalam kebijakan luar negeri AS terkait kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India dengan acuan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Penekanan ekonomi pada konstitusi AS sesuai pemikiran Beard terlihat dalam hal keuntungan ekonomi yang akan didapatkan beserta keuntungan-keuntungan yang lain.

Kesimpulan

Polemik mengenai kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India terkait urgensi, kronologi serta isu mengenai kontroversi kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India menunjukkan kekuatan nuklir menjadi kian berpengaruh pada konstelasi hubungan antarnegara dalam tataran internasional. Konsiderasi pihak eksekutif mengenai kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India menghasilkan temuan data bahwa pihak eksekutif melakukan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India dikarenakan keuntungan yang akan didapat AS, yakni meningkatkan pencapaian nonproliferasi nuklir global, perlindungan terhadap lingkungan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan membantu India untuk menghadapi pertumbuhan energinya dengan kebijakan yang bertanggung jawab. Selain itu, faktor kesamaan ideologi demokrasi menjadikan India sebagai *natural partner* dalam kemitraan strategis dengan AS. Konsiderasi Kongres AS dalam penerimaan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India menunjukkan pertimbangan mengenai keuntungan yang didapat AS dalam kesepakatan kerjasama nuklir AS-India.

Pendekatan realisme dalam hal ini mampu menghubungkan faktor-faktor yang melatarbelakangi AS melakukan kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir dengan India. Pemerintah AS berasumsi bahwa kesepakatan ini akan menguntungkan pencapaian kepentingan nasional AS sehingga bentuk kesepakatan internasional seperti NPT diabaikan. Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri AS yang memiliki konsentrasi kuat pada faktor ekonomi seperti dijelaskan oleh Beard memang menjadi salah satu faktor dalam kesepakatan kerjasama nuklir AS-India, namun tidak lepas dari faktor-faktor lain dalam kepentingan nasional AS.

Keuntungan nasional AS memiliki *framework* utama yang mengacu pada 4P, yakni *power, peace, prosperity* dan *principles* (4P) seperti

yang diungkapkan oleh Ikenberry. Pihak eksekutif dan legislatif AS berasumsi bahwa AS akan mencapai keuntungan dengan elemen keempat *framework* utama pencapaian kepentingan nasional AS tersebut dalam kesepakatan kerjasama nuklir AS-India. Kolaborasi pencapaian tiap elemen kepentingan nasional AS (4P) dalam kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India mampu menggiring pemerintah AS melakukan kebijakan luar negeri yang kontroversial dan sarat standar ganda. Implikasi kesepakatan kerjasama pemanfaatan energi nuklir AS-India memengaruhi konstelasi internasional terkait standar ganda kebijakan luar negeri AS dan isu proliferasi nuklir serta upaya memposisikan kepentingan nasional agar tercapai dengan konsekuensi pengabaian peraturan internasional menjadi kajian yang akan bermanfaat untuk diulas pada penelitian berikut di masa depan.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

Beard, Charles A., 2004. *An Economic Interpretation of the Constitution of the United State*. New York: Dover Publication, Inc.

Cimbala, Stephen J., 2005. *Nuclear Weapon and Strategy: U.S Nuclear Policy for the twenty-first century*. London: Routledge

Cirincione, Joseph. 2007. *Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapon*. New York: Columbia University Press.

Evans, G., dan J. Newnham. 1998. *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books.

Ikenberry, G. John, 2007. *American Foreign Policy Theoretical Essay*. Edisi Keempat. New York: Norton Company Inc.

Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik

Levi, Michael A., dan Charles D. Ferguson, 2006. "US-India Nuclear Cooperation - a Strategy for Moving Forward", *Council on Foreign Relations*, **16**.

Singh, B.B., 2007. "The Hyde Act 2006: India's Nuclear Dilemma", *Atoms for Peace: an International Journal*, **1** (4): 307-319. Inderscience Publishers.

Squassoni, S., dan J. Parillo, 2006. "US-India Nuclear Cooperation: a Side-By-Side Comparison of Current Legislation", *CRS Report for Congress*, **22**.

Sud, Hari, 2006. "India-US Nuclear Deal—the Benefits", *South Asia Analysis Group*, Paper No. 1740. [online]. dalam <http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers18%5Cpaper1740.html> [diakses 26 Mei 2010].

Artikel Online

Carnegieendowment.org, t.t. *United States Bilateral Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=20042&prog=zgp&proj=znpp> [diakses 26 Mei 2010].

Clifton, Eli, 2007. *123 Nuclear Agreement Completed*. [online]. dalam <http://ipsnews.net/print.asp?idnews=38700> [diakses 20 Desember 2009].

Federation of American Scientist, 2002. *Strategic Security Project*. [online]. dalam <http://www.fas.org> [diakses 2 September 2009].

Krishnaswarni, S., 2006. *Indo-US N-deal a Historic Opportunity. Rediff India Abroad*. [online]. dalam <http://www.rediff.com/news/2006/mar/22nddeal.htm> [diakses 26 Mei 2010].

Raman, J. Sri, 2009. *The US-India Nuclear Deal-One Year Later*. [online]. dalam <http://www.thebulletin.org/archive/> [diakses 20 November 2009].

The Times of India, 2008. *US House Approves Indo-US Nuke Deal*. [online]. dalam http://timesofindia.indiatimes.com/US_House_approves_Indo-US_nuke_deal/articleshow/3535443.cms [diakses 24 Mei 2010].

The Acronym Institute, 2008. *Disarmament Diplomacy*. [online]. dalam <http://www.acronym.org.uk> [diakses 28 April 2010].

Situs Resmi Online

Departemen Luar Negeri Indonesia, 2009. Laporan Mingguan KBRI Islamabad.

Departemen Luar Negeri Indonesia, 2009. Laporan Mingguan ke-13 KBRI.

US Department of State Bureau of South and Central Asian Affairs, 2008. 'US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative.' *Fact Sheet of US Department of State*. [online]. dalam www.nti.org/e_research/official_docs/dos/dos080915.pdf [diakses 26 Mei 2010].

U.S. Department of State. 2006. 'US House of Representatives Approves US- India Nuclear Deal: Majority Vote Favors Greater Civil Nuclear Cooperation'. *Bureau of International Information Programs*. [online]. dalam <http://usinfo.state.gov> [diakses 15 Desember 2009].

_____, 2007a. *Outline of US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative: Bilateral Agreement Offers Peaceful Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].

_____, 2007b. *US-India Joint Statement on Completion of Civil Nuclear Negotiations: Agreement Marks a Major Step towards US-India Nuclear Cooperation*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].

_____, 2008. *Statement on US-India Civil Nuclear Cooperation Initiative: Bush Approves US Agreement for Peaceful Nuclear Cooperation with India*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].

_____, 2008. *Congress Approves US-India Civil Nuclear Accord: Agreement Opens Up Enhanced Trade Between United States and India*. [online]. dalam <http://www.america.gov> [diakses 15 Desember 2009].

Senate Report 109-288. 2006. *Library of Congress – The U.S.-India Civil Nuclear Cooperation Initiative*. [online]. dalam http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/?&dbname=cp109&sid=cp1095EqIO&refer=&r_n=sr288.109&item=&sel=TOC_341138& [diakses 24 Mei 2010].

Media Massa Online

BBC News. 2008. *Bush Signs US-India Nuclear Bill*. [online]. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/default.stm [diakses 20 November 2009].

Bloomberg. 2008. *Bush Wins Approval in Congress for Priority Atomic Accord*. [online]. dalam <http://preview.bloomberg.com/apps/>

news?pid=newsarchive _en10&sid=a7dN2SDjU0ok [diakses 24 Mei 2010].

Lain-Lain

Cirincione, Joseph. 2006. '123 Agreement Chart: Issue in US-India Nuclear Cooperation'. *Carnegie Endowment for International Peace*.

Koizumi, S., 2006. 'US-INDIA Nuclear Agreement Tests Japan's Proactive Diplomacy'. *Japan Chair Platform*.

Kronstadt, Alan K.2007. 'India-US Relations'. *CRS Report for Congress*.

Pan, E. dan Bajoria. 2008. 'The U.S.-India Nuclear Deal'. *Council of Foreign Relation*.

Spector, L. 2008. 'Symbolism Tops Substance in US-India Nuclear Agreement.' *Council of Foreign Relation*.

Squassoni, S. 2005. 'U.S Nuclear Cooperation with India: Issues for Congress'. *CRS Report for Congress RL33016*.

_____.2007. 'Issues in US-India Nuclear Cooperation.' *Proliferation Analysis*. [online]. dalam <http://www.carnegieendowment.org/files/123agreementchart.pdf> [diakses 24 Mei 2010].